

Kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro 1 dan 2 menjadi keseriusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menata kawasan wisata di daerahnya. Relokasi PKL ini dilakukan sebagai momentum awal tujuan pemerintah, yakni mengembalikan hak pejalan kaki yang sempat hilang sekaligus membuat status pedagang menjadi legal. Selain itu, relokasi juga menjadi alasan atas upaya pencalonan sumbu filosofis *Gumaton* menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO. Meskipun wacana sudah digaungkan dari beberapa tahun ke belakang, implementasi yang dilakukan cenderung cepat dan banyak PKL yang belum siap.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari wawancara secara mendalam kepada 14 informan yang terbagi menjadi 1 informan kunci yakni ketua paguyuban PKL, 9 PKL sebagai informan utama, dan 2 perwakilan pengelola serta 2 wisatawan sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah dengan mereduksi, menyajikan, menganalisis, dan memverifikasi data. Dan uji keabsahan data yang dipakai adalah dengan triangulasi data.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat kendala pasca relokasi seperti penurunan pendapatan akibat kebijakan PPKM, bangunan baru yang kurang ramah cuaca, hingga perubahan pola pikir wisatawan. Para PKL melalui proses penerimaan diri yang panjang sebelum akhirnya bisa beradaptasi. PKL mengalami penolakan, kemudian muncul protes, negosiasi, stres, hingga akhirnya melakukan penerimaan. Strategi adaptasi yang dilakukan PKL dibagi berdasarkan lokasi strategis dan kurang strategis, serta kuliner dan non-kuliner. Strategi tersebut di antaranya menambah jam operasional, berjualan online, penghematan pengeluaran keluarga, melakukan peminjaman untuk penambahan modal, hingga komunikasi persuasif dengan para wisatawan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Strategi Adaptasi, Relokasi

ABSTRACT

The policy of relocating street vendors to Teras Malioboro 1 and 2 has become the seriousness of the Yogyakarta Special Region Government on managing tourist areas. The relocation of street vendors was carried out as the initial momentum for the government's goal, to restore pedestrian rights that had been lost. In addition, the relocation is also the reason for the nomination of Gumaton's philosophical axis to become a world cultural heritage to UNESCO. Even though the discourse has been echoed for the past few years, the implementation tends to be fast and many street vendors are not ready.

This research uses a descriptive qualitative method with primary and secondary data sources. Primary data was taken from in-depth interviews with 14 informants which were divided into 1 key informant; the chairman of the street vendor association, 9 street vendors as the main informants, and 2 management representatives and 2 tourists as supporting informants. Data collection techniques in this study used observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis technique used is to reduce, present, analyze, and verify data. And data validity test is used by data triangulation.

Based on the field results, there are several obstacles experienced by street vendors after relocation that causing decreased incomes, there are between PPKM policy, less weather friendly of Teras Building, and the mindset changes of tourists. The street vendors went through a long process of self-acceptance before finally being able to adapted. The street vendors was denial, and turned into revolt, bargaining, becoming stress, and then did acceptance. Street vendors adaptation strategy are divided by location, strategic and less strategic, as well as culinary and non-culinary. Adaptation strategy that has done by street vendors are adding shop operating hours, online selling, savings on family expenses, make loans to increase capital, and did a persuasive communications to a tourists.

Keywords: Street Vendors, Adaptation Strategies, Relocation